

## ABSTRAK

**Irfan Julianto (0910831002) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. Pembimbing 1 Drs. Syaiful M.Si dan Pembimbing II Irawati S.IP MA. Judul Skripsi : Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Padang Periode 2009-2014.**

Badan Kehormatan (BK) dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD, namun BK tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Hal ini disebabkan karena BK tidak terlalu memiliki keberanian moral, politik dan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kepada anggota dewan. Tidak hanya tentang pengaduan perilaku buruk anggota Dewan tetapi juga berbagai penyimpangan terhadap tindakan yang dilakukannya. Anggota BK merasa terancam posisi politiknya dari atasannya didalam partai. Untuk memperkuat Eksistensi BK, maka masyarakat sebagai pemilik kedaulatan hendaknya diberi porsi yang lebih besar untuk bisa berpartisipasi dalam penegakan kode etik DPRD. Kode Etik yang merupakan acuan dari sikap dan perilaku anggota dewan haruslah dijadikan langkah tegas dalam melakukan berbagai kebijakan agar tidak terjadinya berbagai penyimpangan dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD kota Padang terhadap anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 belum jelas dan berfungsi maksimal meskipun sudah dijalankan dengan baik. Hal ini karena BK DPRD Kota Padang masih mempunyai banyak kendala dalam menjalankan wewenangnya terutama dalam rekrutmen keanggotaan BK, lemahnya penerapan tata tertib dan kode etik DPRD, pedoman tata beracara BK, masalah prosedural penanganan pengaduan yang rumit dan berbelit-belit.

Kata Kunci : DPRD, Badan Kehormatan dan Kode Etik.

## ABSTRACT

**Irfan Julianto (0910831002) Department of Political Science, Faculty of Social Sciences Political Science University of Andalas, Padang. Supervisor 1 Drs. Syaiful M.Si and Supervisor II Irawati S.IP,MA. Thesis Title: Enforcement of the Code of Ethics by the Honorary Board Member of Parliament to the DPRD Padang period 2009-2014.**

Honorary Board (BK) was established to enforce the code of ethics of Parliament, but BK is not functioning properly in connection with code violations committed by members of Parliament. This is because BK is not too have the moral courage, political and strict law to impose sanctions on members of the board. Not only on the complaint of bad behavior Council members but also various deviations from the actions. BK members feel threatened by his superiors in the political position of the party. To strengthen BK existence, the community as the owner of sovereignty should be given a larger portion to be able to participate in the enforcement of the code of ethic of Parliament. Code of Ethic which is a reference of the attitudes and behavior of board members must be a decisive step in conducting various policies to avoid the occurrence of various irregularities in conducting various activities. This study concluded that the enforcement of the code of conduct by the Honorary Board DPRD Padang city against members of the DPRD Padang period 2009-2014 is not yet clear, and works even though it is well run. This is because BK DPRD Padang still have many obstacles in carrying out its authority, especially in membership recruitment BK, weak implementation of codes of conduct and code of ethics of Parliament, procedural governance guidelines BK, complaint handling procedural issues are complicated and convoluted.

Keywords: Parliament, Honorary Board and the Code of Ethic.